



Research Article

Kebijakan Pendidikan Islam di Era Reformasi: Menuju Sistem yang Lebih Progresif

Alya Mardatillah B¹, Rezzi Yanti Naimah², Asmuri³, Muhammad Darimus⁴

1. Program Magister Pendidikan Agama Islam, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Indonesia
E-mail: 2239012491@students.uin-suska.ac.id 
2. Program Magister Pendidikan Agama Islam, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Indonesia
E-mail: 2239012491@students.uin-suska.ac.id
3. Program Magister Pendidikan Agama Islam, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Indonesia
E-mail: asmuri@uin-suska.ac.id
4. Program Magister Pendidikan Agama Islam, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Indonesia
E-mail: darimus@uin-suska.ac.id



Copyright © 2026 by Authors, Published by AL-AFKAR: Journal For Islamic Studies. This is an open access article under the CC BY License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>).

Received : April 25, 2026
Accepted : June 12, 2026

Revised : May 27, 2026
Avalable online : July 29, 2026

How to Cite: Alya Mardatillah B (2026) "Islamic Education Policy in the Reform Era: Towards a More Progressive System", *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 9(2), pp. 3165–3182. doi: 10.31943/afkarjournal.v9i2.2056.

Islamic Education Policy in the Reform Era: Towards a More Progressive System

Abstract. This study examines Islamic education policy in Indonesia during the Reformation era, highlighting the transformation from a centralized to a decentralized system, strategic policies, progress, and challenges faced. Islamic education gained strong legitimacy within the national education system through Law Number 20 of 2003, which expanded recognition of various Islamic educational institutions. Furthermore, strategic policies such as the allocation of 20% of the state budget (APBN), compulsory education programs, and the development of competency-based curricula have had a positive impact. However, challenges such as regional disparities and radicalism remain a concern. This study emphasizes the importance of innovation and inclusivity to ensure Islamic education remains relevant in the era of globalization.

Keywords: Islamic Education, Reform, Strategic Policy, Innovation, Globalization.

Abstrak. Penelitian ini mengkaji kebijakan pendidikan Islam di Indonesia selama era Reformasi, menyoroti transformasi dari sistem sentralistik ke desentralistik, kebijakan strategis, kemajuan, serta tantangan yang dihadapi. Pendidikan Islam memperoleh legitimasi kuat dalam sistem pendidikan nasional melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, yang memperluas pengakuan terhadap berbagai lembaga pendidikan Islam. Selain itu, kebijakan strategis seperti alokasi anggaran 20% APBN, program wajib belajar, serta pengembangan kurikulum berbasis kompetensi telah memberikan dampak positif. Namun, tantangan seperti kesenjangan regional dan radikalisme tetap menjadi perhatian. Penelitian ini menekankan pentingnya inovasi dan inklusivitas untuk memastikan pendidikan Islam terus relevan di era globalisasi.

Kata Kunci : Pendidikan Islam, Reformasi, Kebijakan Strategis, Inovasi, Globalisasi.

PENDAHULUAN

Keberadaan dan perkembangan pendidikan Islam di Indonesia saat ini tidak dapat dipisahkan dari berbagai fase sejarah yang dipengaruhi oleh faktor politik dan kebijakan-kebijakan yang diterapkan pada masa-masa sebelumnya. Era reformasi, yang muncul setelah runtuhnya orde baru, menandai awal dari babak baru dalam bentuk demokrasi di berbagai aspek, termasuk dalam bidang Pendidikan. Pendidikan, terutama pendidikan Islam, memiliki kaitan yang erat dengan kebijakan politik, karena setiap perubahan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, baik besar maupun kecil, akan memengaruhi dunia pendidikan.

Era Reformasi ditandai dengan turunnya Soeharto yang menjadi akhir dari masa jabatannya sebagai presiden sebab dari desakan berbagai elemen masyarakat yang dipelopori oleh gerakan reformasi mahasiswa pada tahun 1998. Hingga saat ini, selama kurang lebih 20 tahun, sudah lima kali terjadi pergantian presiden. Sejak kekuasaan Orde Baru tumbang pada Mei 1998, kondisi Indonesia dalam keadaan tidak menentu, meskipun upaya pembaharuan sudah sering dilakukan oleh berbagai pihak. Begitu pula sistem pendidikan yang ada dirasakan masih dirasa sentralistik. Di era ini telah terjadi perubahan dari sistem pemerintahan yang bercorak sentralistik menuju desentralistik.

Era reformasi telah membuka ruang yang luas bagi perumusan kebijakan pendidikan yang bersifat reformatif dan revolusioner. Perubahan dari sistem pendidikan sentralistik pada orde lama menuju desentralistik di era orde baru dan reformasi merupakan salah satu bentuk perubahan tersebut. Dalam upaya menghasilkan generasi bangsa yang berkualitas, pemerintah terus melakukan penyempurnaan kebijakan. Namun, seperti yang telah banyak dibahas, penentuan kebijakan dalam dunia pendidikan tidak dapat dipisahkan dari dinamika politik yang sedang berlangsung. Hal ini dapat dilihat melalui penelusuran sejarah terkait proses dan dinamika dalam penetapan kebijakan.¹ (Hudaidah, 2021)

Politik pendidikan Islam di Indonesia sejak periode reformasi hingga saat ini telah mengalami perubahan dan perkembangan yang signifikan. Era reformasi yang dimulai pada tahun 1998 membawa perubahan politik yang membuka lebih banyak ruang bagi diskusi dan partisipasi publik. Dalam ranah pendidikan Islam, kebijakan politik yang diterapkan bertujuan untuk memperkuat pendidikan agama Islam, meningkatkan kualitas tenaga pengajar, memperbaiki fasilitas pendidikan, serta mempromosikan nilai-nilai keagamaan, keberagaman, dan toleransi di masyarakat. Salah satu kebijakan penting yang diimplementasikan adalah program Satu Guru Satu Kelas (SGSK), yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas proses belajar-mengajar, termasuk dalam pendidikan Islam. Program ini memungkinkan satu guru mengajar satu kelas dengan jumlah siswa lebih sedikit, sehingga interaksi antara guru dan siswa menjadi lebih intensif.

Selain itu, pemerintah juga berkomitmen untuk membangun dan memperbaiki infrastruktur pendidikan, termasuk lembaga pendidikan Islam. Upaya ini bertujuan untuk meningkatkan akses, kualitas, dan kesetaraan pendidikan bagi seluruh masyarakat Indonesia, termasuk pendidikan Islam. Peningkatan kualitas guru juga menjadi prioritas dalam kebijakan politik pendidikan Islam di Indonesia. Guru-guru pendidikan Islam mendapatkan pelatihan dan pengembangan kompetensi untuk meningkatkan keterampilan mengajar, pemahaman agama, serta penguasaan metode pembelajaran yang inovatif. Peningkatan kualitas ini diharapkan berdampak positif terhadap pembelajaran agama Islam di sekolah-sekolah.

Selain itu, pengembangan kurikulum pendidikan Islam juga menjadi salah satu fokus dalam kebijakan pendidikan. Kurikulum ini diperbarui dan disesuaikan dengan kebutuhan zaman serta kebutuhan peserta didik. Kurikulum yang diperkaya dengan nilai-nilai agama, keberagaman, dan toleransi diharapkan mampu membentuk generasi muda yang inklusif dan menghargai perbedaan. Pemerintah juga mengembangkan program pendidikan agama yang menitikberatkan pada penguatan nilai-nilai agama, keberagaman, dan toleransi dalam masyarakat, bertujuan memperkuat pemahaman agama, kerukunan antaragama, dan meningkatkan partisipasi dalam kegiatan keagamaan yang mempererat hubungan antarumat.

¹ Tiara Salwadila dan Hudaidah, 2021, Sistem dan Kebijakan Pemerintah Terhadap Pendidikan Islam Pada Era Reformasi, *SINDANG: Jurnal Pendidikan Sejarah dan Kajian Sejarah*, Vol. 3, No. 2, h. 159.

Reformasi membawa desentralisasi kekuasaan dan kebebasan yang lebih besar dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pendidikan. Ini membuka ruang bagi institusi pendidikan Islam untuk lebih otonom dan merespons kebutuhan lokal. Namun, kontestasi kebijakan tetap terjadi, terutama dalam hal bagaimana pendidikan Islam harus diintegrasikan ke dalam sistem pendidikan nasional yang lebih inklusif dan pluralistik.

Secara keseluruhan, pendidikan Islam di Indonesia sejak masa reformasi mencerminkan upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas pendidikan agama Islam, memperkuat keberagaman dan toleransi, serta menciptakan lingkungan pendidikan yang inklusif. Walaupun masih ada berbagai tantangan yang harus dihadapi, kebijakan ini memberikan harapan bagi pengembangan pendidikan Islam di masa mendatang.² (Sirozi, 2023)

Pembahasan kebijakan pendidikan Islam di era reformasi penting karena pendidikan merupakan pilar utama dalam pembentukan karakter dan kualitas sumber daya manusia. Reformasi membawa perubahan besar dalam sistem pendidikan, khususnya pendidikan Islam, yang berperan penting dalam masyarakat mayoritas Muslim di Indonesia. Memahami kebijakan ini membantu melihat bagaimana negara berupaya meningkatkan kualitas pendidikan agama sekaligus memperkuat nilai-nilai keberagaman dan toleransi.

Evaluasi kebijakan pendidikan Islam di masa reformasi juga penting untuk menilai tantangan yang masih dihadapi serta menentukan arah pengembangan yang lebih baik di masa depan, terutama dalam menghadapi globalisasi dan perubahan sosial yang cepat.

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian studi pustaka (library research) (Sujatmiko, 2020). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui kajian kepustakaan, dengan mengumpulkan data primer dan sekunder yang relevan dengan topik Kebijakan Pendidikan Islam di Era Reformasi, termasuk aspek-aspek perubahan politik dan sosial yang terjadi pada masa Reformasi, serta kebijakan pendidikan yang dikeluarkan oleh pemerintah terkait pendidikan Islam. Data yang diperoleh kemudian direduksi dan dianalisis menggunakan metode analisis isi (content analysis) dan analisis deskriptif. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kesimpulan yang sesuai dengan fokus pembahasan makalah ini, yaitu "Kebijakan Pendidikan Islam di Era Reformasi: Menuju Sistem yang Lebih Progresif", dengan mengidentifikasi bagaimana kebijakan Reformasi telah memengaruhi perkembangan dan perubahan sistem pendidikan Islam, serta peran lembaga pendidikan Islam dalam merespons kebijakan tersebut. Penelitian ini juga bertujuan untuk menggambarkan tantangan dan peluang yang dihadapi oleh lembaga pendidikan Islam dalam menciptakan sistem yang lebih inklusif, demokratis, dan modern sesuai dengan prinsip-prinsip Reformasi.

² Ana Kurnia Sari dan Muhammad Sirozi, 2023, Politik Pendidikan Islam Masa Reformasi (1998-Sekarang), *Tarbawiy: Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 10, No. 1, h. 21-22.

HASIL PENELITIAN

Masa Reformasi

Reformasi adalah istilah yang sangat populer dalam periode transisi ini, menjadi kunci dalam perbaikan tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia, termasuk reformasi di bidang pendidikan. Pada era ini, masyarakat Indonesia bercita-cita untuk menghadirkan perubahan di seluruh aspek kehidupan.³ (Tolchah, 2015)

Masa Reformasi, dimulai sejak 1998 setelah pengunduran diri Presiden Soeharto, menandai periode penting dalam sejarah Indonesia. Periode ini membawa perubahan besar di bidang politik, sosial, dan ekonomi untuk membangun demokrasi yang lebih inklusif. Reformasi bertujuan memulihkan nilai-nilai demokrasi, kebebasan, dan hak asasi manusia yang sempat terabaikan selama masa Orde Baru. Perubahan mencakup penghapusan monopoli partai politik, amandemen konstitusi, pemilu langsung, serta kebebasan pers yang lebih luas.

Saat ini, Indonesia terus berkembang di berbagai sektor, termasuk upaya meningkatkan infrastruktur, memperkuat demokrasi, dan mendorong perekonomian. Tantangan seperti ketimpangan sosial, korupsi, dan masalah lingkungan masih memerlukan perhatian. Reformasi juga menciptakan peluang pembaruan pendidikan, termasuk penerapan kurikulum berbasis kompetensi dan sistem pendidikan desentralistik. Pemerintah memenuhi amanat UUD 1945 dengan mengalokasikan minimal 20% anggaran untuk pendidikan.

Faktor-faktor utama di balik Reformasi mencakup krisis ekonomi yang memicu demonstrasi besar-besaran, yang akhirnya mendorong Soeharto mundur setelah tiga dekade berkuasa. Masa transisi ini memulai era pemilu langsung dan demokrasi. Berbagai reformasi politik diterapkan untuk meningkatkan partisipasi publik, memperkuat sistem multi-partai, serta membentuk lembaga independen seperti KPU dan Bawaslu. Kebebasan pers membuka ruang bagi media untuk berperan dalam mengawasi pemerintah.

Walaupun Reformasi membawa banyak kemajuan, tantangan seperti korupsi, konflik etnis dan agama, serta masalah ketimpangan sosial-ekonomi tetap menjadi pekerjaan rumah besar. Transformasi yang berkelanjutan diperlukan untuk mewujudkan masyarakat yang lebih adil dan demokratis.

Pendidikan Islam Pada Masa Reformasi

Era Reformasi membawa perubahan besar dalam pendidikan Islam di Indonesia, terutama setelah runtuhnya Orde Baru. Perubahan ini ditandai dengan pergeseran dari sistem yang sentralistik dan birokratis menuju desentralisasi dan demokratisasi, menjadikan pendidikan lebih terbuka dan inklusif terhadap masukan masyarakat.

Salah satu perubahan signifikan adalah peningkatan otonomi dalam pengelolaan pendidikan, khususnya di perguruan tinggi Islam. Perguruan tinggi seperti IAIN yang berubah menjadi UIN mulai mengintegrasikan ilmu-ilmu umum

³ Tolchah, 2015, *Dinamika Pendidikan Islam Pasca Orde Baru*, Yogyakarta: Lkis Pelangi Aksara, h. 252.

dengan nilai-nilai keagamaan. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas lulusan dan memastikan bahwa pendidikan Islam relevan dengan tuntutan zaman.

Posisi pendidikan Islam semakin diperkuat dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang mengakui kesetaraan antara pendidikan Islam dan pendidikan umum. Pendidikan Agama Islam menjadi mata pelajaran wajib di sekolah umum, menunjukkan pengakuan terhadap peran penting pendidikan Islam dalam sistem pendidikan nasional.

Pesantren dan madrasah mengalami perkembangan pesat, baik dari segi jumlah maupun kualitas. Pemerintah juga meningkatkan alokasi anggaran pendidikan hingga 20% dari APBN, termasuk untuk pendidikan Islam. Upaya ini dilengkapi dengan pemerataan guru serta perubahan kurikulum yang lebih relevan dengan kebutuhan masyarakat.

Kerjasama antara pemerintah, tokoh agama, dan masyarakat turut mendorong perubahan yang lebih baik, terutama dalam bidang pendidikan Islam. Diharapkan, dengan adanya Pendidikan Agama Islam, para pelajar dapat memperoleh pengetahuan umum sekaligus pengetahuan tentang syariat Islam. Hal ini penting agar siswa tidak hanya fokus pada pendidikan umum, tetapi juga memahami pendidikan moral yang sesuai dengan ajaran Islam. Pendidikan Agama Islam pada masa Reformasi mengalami perkembangan yang signifikan dibandingkan masa sebelumnya. Perkembangan ini diharapkan terus berlanjut, agar generasi mendatang tidak hanya cerdas dalam ilmu umum, tetapi juga dalam ilmu agama, yang mengajarkan perilaku baik dan penerapan nilai-nilai Al-Quran. Tak hanya pendidikan Agama Islam, pendidikan secara menyeluruh, termasuk pendidikan agama lain, juga mengalami kemajuan selama era Reformasi. (Zidah, 2021)

H.M. Yusuf Hasyim menyoroti peran penting pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam yang bertanggung jawab atas pencerdasan bangsa. Pendidikan Islam bertujuan melestarikan tradisi keislaman dan membentuk manusia beriman yang memiliki kualitas moral dan intelektual. Banyak pesantren dan madrasah saat ini mengadopsi model pendidikan modern, yang memperhatikan tujuan pendidikan nasional Indonesia. Oleh sebab itu, pendidikan pesantren akan memadukan produk santri untuk memiliki output nya (lulusan) agar memiliki tiga tipe lulusan berikut:

1. **Religious Skillful People:** Muslim yang terampil, cerdas, mandiri, dan memiliki iman kuat, yang dapat berkontribusi di berbagai sektor pembangunan.
2. **Religious Community Leader:** Individu yang cerdas dan mandiri, mampu memimpin transformasi sosial dan budaya serta melakukan pengendalian sosial.
3. **Religious Intellectual:** Orang yang memiliki integritas kuat, mampu menganalisis masalah ilmiah, dan peduli terhadap isu-isu ilmiah.

Dengan berbagai perubahan ini, pendidikan Islam pada era reformasi terus berkembang dan berusaha menyesuaikan diri dengan tuntutan zaman, sehingga tidak tertinggal dalam menghadapi berbagai tantangan baru di masa depan.⁴ (Bahri, 2020)

Dalam menghadapi era Reformasi, Indonesia perlu melakukan pembaruan sistem pendidikan secara mendalam. Fokus utamanya adalah menciptakan sistem

⁴ Samsul Bahri, 2020, *Sejarah Sosial Pendidikan Islam*, Jawa Barat: Adab, h. 72-74.

pendidikan yang lebih komprehensif dan fleksibel, sehingga lulusan mampu beradaptasi dan berkontribusi secara efektif dalam masyarakat global yang demokratis. Pendidikan harus dirancang sedemikian rupa agar peserta didik dapat mengembangkan potensi alaminya secara kreatif dalam suasana yang mendukung kebebasan, kebersamaan, dan tanggung jawab.

Selain itu, pendidikan diharapkan mampu mencetak lulusan yang memahami masyarakatnya, termasuk faktor-faktor yang mendukung keberhasilan maupun yang menjadi penghambat dalam kehidupan bermasyarakat. Salah satu langkah strategis adalah mengembangkan pendidikan dengan wawasan global. Program pendidikan juga perlu diperbarui, dimodernisasi, dan dibangun ulang agar mampu memenuhi kebutuhan serta fungsi yang diharapkan.

Menurut Rahman, solusi utama terletak pada pengembangan wawasan intelektual yang kreatif, dinamis, serta terintegrasi dengan nilai-nilai Islam. Sementara itu, Tibi mengusulkan bahwa solusi kunci adalah sekularisasi, yang merujuk pada industrialisasi masyarakat dan diferensiasi fungsional antara struktur sosial dan sistem keagamaannya. Penting untuk mengkaji kembali langkah-langkah yang diperlukan guna menghadapi tantangan ini, termasuk mengembangkan model pendidikan Islam yang relevan untuk masa depan, baik dalam mencegah maupun mengatasi hambatan tersebut.

Pendekatan ini melibatkan proses nazhar, yang dapat berarti perenungan mendalam atau pengujian kritis terhadap berbagai ide. Nazhar juga mencakup perubahan cara pandang dan kerangka berpikir untuk memahami dan menilai sesuatu dari berbagai perspektif. Dalam hal ini, berpikir alternatif, kritis, kreatif, dan inovatif menjadi esensial, terutama dalam menelaah gagasan serta rencana kerja yang telah dirancang untuk menyongsong masa depan yang lebih baik. Fokus utamanya adalah pada generasi mendatang, yang diharapkan mampu beradaptasi dengan perubahan di era reformasi ini. Generasi Islam diharapkan berpikir kritis, inovatif, dan solutif dalam menghadapi persoalan pendidikan Islam, baik dalam konteks sistem pemerintahan maupun sistem pendidikan nasional. (Izza Lutfiyana, 2021)

Kekuatan Pendidikan Islam: Pendidikan yang Berakar pada Masyarakat
Dalam era reformasi yang tengah berlangsung, seiring dengan arus demokratisasi di tingkat global dan nasional, muncul tuntutan masyarakat untuk mendapatkan hak-hak mereka, termasuk dalam bidang pendidikan.

Kelemahan: Cenderung Pada Ortodoksi Ironisnya, kekuatan pendidikan pesantren dan madrasah juga menjadi titik kelemahannya. Sepanjang sejarah, sistem pendidikan ini sering terpinggirkan dari arus utama pendidikan, baik selama masa kolonial, pendudukan Jepang, maupun era kemerdekaan. Kelemahan ini berkaitan dengan sifat unik pesantren dan madrasah yang tumbuh dari akar masyarakat. Untuk mengatasi tantangan ini, ada empat bidang prioritas dalam pengelolaan pendidikan Islam, yaitu:

1. Peningkatan kualitas pendidikan,
2. Pengembangan inovasi dan kreativitas,
3. Pembangunan jaringan kerja sama (networking), dan
4. Implementasi otonomi daerah. (Debiyandrizar, 2023)

Pendidikan Islam pada masa Reformasi di Indonesia mencerminkan periode perubahan yang signifikan, terutama setelah runtuhnya Orde Baru. Dalam masa Reformasi, kebijakan dan arah pendidikan Islam mengalami pergeseran ke arah yang lebih demokratis dan desentralistik. Fokus utama pendidikan Islam pada masa ini adalah peningkatan kualitas dan akses, dengan penekanan pada transparansi dan desentralisasi pengelolaan pendidikan, yang memungkinkan lembaga-lembaga pendidikan Islam berkembang lebih pesat dibandingkan sebelumnya.

Secara keseluruhan, era Reformasi membawa harapan baru untuk kebebasan dan inovasi dalam pendidikan, tetapi juga menuntut penanganan yang hati-hati terhadap tantangan-tantangan yang muncul. Pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya perlu bekerja sama untuk memastikan bahwa desentralisasi dalam pendidikan tidak mengorbankan kualitas dan kesetaraan pendidikan di seluruh Indonesia.

Kebijakan Pendidikan Islam Pada Masa Reformasi

Pada masa Reformasi, pendidikan Islam mengalami perubahan signifikan dibandingkan masa Orde Baru. Perubahan ini muncul sebagai respons terhadap berbagai dinamika politik dan sosial serta inovasi yang berkembang dalam masyarakat. Tujuan utama kebijakan pendidikan Islam pada masa ini adalah untuk memperbaiki dan memperkuat sistem pendidikan Islam melalui berbagai kebijakan strategis.

Kebijakan-kebijakan pemerintah, mulai dari masa penjajahan hingga masuk orde baru terkesan “menganak tirikan” bahkan ingin menghapus system pendidikan Islam. Namun, berkat semangat juang dari para petinggi Islam membuahkan hasil untuk sebuah tujuan yang ideal. Dengan ditetapkannya Undang-Undang No 20 Tahun 2003, kedudukan pendidikan Islam lebih dipertegas lagi sebagai salah satu elemen yang menciptakan tujuan pendidikan nasional secara umum. (Nirmala, 2024)

Berikut adalah beberapa kebijakan utama yang diterapkan selama era Reformasi:

1. Penguatan Pendidikan Islam dalam Sistem Pendidikan Nasional

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 mengubah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 dengan memperluas cakupan pendidikan Islam. Selain madrasah, undang-undang ini juga mengakui pesantren, ma'had Ali, Raudhotul Athfal (TK), dan Majelis Ta'lim sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional. Langkah ini meningkatkan eksistensi pendidikan Islam dan menghapus diskriminasi serta dikotomi antara pendidikan agama dan umum. UU ini menjadi tonggak penting bagi pendidikan Islam di Indonesia, mengakomodasi pengembangan lembaga pendidikan Islam, serta sumber daya manusia, pengelolaan, dan hasil yang diharapkan.

Aspek utama dalam UU tersebut adalah:

- a. Pengakuan terhadap pendidikan formal, nonformal, dan informal yang setara dengan pendidikan umum.
- b. Pendidikan Islam sebagai mata pelajaran di sekolah dan lembaga pendidikan Islam seperti pesantren dan madrasah.

c. Pendidikan Islam sebagai nilai pembentukan karakter dan moral peserta didik.⁵ (Syarif, 2020)

2. Peningkatan Anggaran Pendidikan

Pemerintah mengalokasikan 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk pendidikan, termasuk pendidikan Islam. Anggaran ini mencakup berbagai aspek, seperti gaji guru dan dosen, biaya operasional pendidikan, beasiswa bagi siswa kurang mampu, pengadaan buku gratis, peningkatan infrastruktur, dan pengembangan sumber daya manusia di lembaga pendidikan di bawah Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan Nasional. Kebijakan ini memberikan dampak positif terhadap perkembangan pendidikan, termasuk pendidikan Islam, yang mengalami kemajuan signifikan dibandingkan sebelumnya.

3. Program Wajib Belajar 9 Tahun

Setiap anak Indonesia diwajibkan menyelesaikan pendidikan minimal 9 tahun. Kebijakan ini berlaku untuk lembaga pendidikan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan Nasional maupun Kementerian Agama, menjamin akses pendidikan bagi semua anak Indonesia.

4. Sekolah Bertaraf Nasional dan Internasional

Penyelenggaraan Sekolah Bertaraf Nasional (SBN) dan Sekolah Bertaraf Internasional (SBI) mengikuti standar pendidikan nasional dan internasional. Meskipun, setelah perdebatan panjang, label sekolah internasional dihapus oleh Mahkamah Konstitusi untuk menghindari diskriminasi dan menjaga cita-cita pendidikan nasional, serta menghargai lembaga pendidikan Islam.

5. Sertifikasi Guru dan Dosen

Pemerintah menerapkan kebijakan sertifikasi bagi guru dan dosen, baik di lembaga negeri maupun swasta. Kebijakan ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005, yang mengalokasikan 20% dari APBN untuk meningkatkan kompetensi akademik, pedagogik, kepribadian, dan sosial tenaga pengajar. Sertifikasi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan secara keseluruhan.

6. Pengembangan Kurikulum Berbasis Kompetensi dan KTSP

Pada tahun 2004, Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) diperkenalkan, diikuti dengan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) pada tahun 2006. Kurikulum ini berfokus pada penguasaan materi serta kemampuan siswa dalam proses memperoleh pengetahuan, seperti membaca, menganalisis, dan memecahkan masalah. Hal ini bertujuan agar siswa menjadi percaya diri, kreatif, dan mandiri serta siap menghadapi tantangan globalisasi.

7. Pendekatan Pembelajaran Berpusat pada Siswa

Pendekatan ini mengutamakan partisipasi aktif siswa, yang tidak hanya bergantung pada pengajaran guru. Metode ini mendorong kreativitas, inovasi, dan pemecahan masalah dalam suasana belajar yang menyenangkan dan demokratis. Siswa dianggap sebagai subjek yang berhak memberi masukan terhadap metode pembelajaran.

⁵ Zainul Hasani Syarif, 2020, *Agama&Perubahan Sosial*, Jakarta: Publica Institute Jakarta, h. 124-126.

8. Manajemen Pendidikan Berorientasi Pelayanan

Pendidikan dipandang sebagai komoditas yang harus menarik minat masyarakat dengan meningkatkan kualitas layanan. Pemerintah mengatur standar pendidikan nasional melalui Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, yang mencakup standar isi, proses, pendidik, pengelolaan, dan pembiayaan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di semua jenjang.

9. Madrasah sebagai Sekolah Umum Berciri Agama

Madrasah diubah menjadi sekolah umum yang juga mengajarkan pendidikan agama, setara dengan sekolah umum seperti SD, SMP, dan SMA. Kebijakan ini memberi peluang bagi madrasah untuk menjadi pilihan utama masyarakat dalam pendidikan yang mengintegrasikan ilmu agama dengan pelajaran umum.⁶ (Nata, 2022)

Sejalan dengan munculnya kebijakan pendidikan nasional yang lebih inklusif dan progresif, masyarakat, terutama pengelola pendidikan, memberikan tanggapan yang positif. Inovasi dan kreativitas dalam dunia pendidikan terus berkembang, didukung oleh program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang mempermudah akses pendidikan bagi siswa kurang mampu. Program sertifikasi guru dan dosen turut mendorong peningkatan profesionalisme tenaga pendidik. Selain itu, penerapan kurikulum berbasis kompetensi dan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) menciptakan suasana belajar yang lebih mandiri dan kreatif. Standar Nasional Pendidikan mendorong lembaga pendidikan melakukan akreditasi untuk menjamin mutu pendidikan yang ditawarkan.⁷ (Syaiful, 2018)

Pada masa Reformasi, kebijakan pendidikan nasional berusaha menyatukan standar antara pendidikan umum (sekolah) dan pendidikan Islam (madrasah). Keduanya kini mengikuti Standar Nasional Pendidikan, meskipun dengan ciri khas masing-masing. Komponen standar mencakup aspek guru, sarana prasarana, penilaian, dan pembiayaan.

Untuk pendidikan agama Islam, pemerintah mengeluarkan kebijakan operasional seperti PP No. 55 Tahun 2007 dan Permenag No. 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam, serta Permenag No. 18 Tahun 2014 tentang Pendidikan Pesantren Muadalah. Kebijakan ini mempertegas peran madrasah diniyah dan pesantren sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional dengan tujuan mencetak ahli ilmu agama Islam.⁸ (Putra, 2022)

Pada masa kini, pertumbuhan lembaga pendidikan Islam seperti madrasah, pesantren, dan sekolah Islam Terpadu semakin pesat. Di tingkat perguruan tinggi, transformasi Institut Agama Islam Negeri menjadi Universitas Islam Negeri menunjukkan modernisasi lembaga pendidikan Islam yang semakin diakui. Selain itu, kurikulum pendidikan Islam telah mengintegrasikan nilai-nilai ajaran agama Islam sebagai bagian dari semangat pendidikan nasional.

⁶ Abuddin Nata, 2022, *Sejarah Pendidikan Islam*, Jakarta: Kencana, h. 252-259.

⁷ Ach. Syaiful, 2018, Politik Pendidikan Islam Masa Reformasi, *AL-IMAN: Jurnal Keislaman dan Kemasyarakatan*, Vol. 2, No. 1, h. 143-148.

⁸ Hasbullah dan Arizal Eka Putra, 2022, Pendidikan Islam Orde Reformasi (Pendekatan Politik dan Kebijakan Pendidikan), *Jurnal Ilmu Agama Islam*, Vol. 4, No. 1, h. 28.

Seiring dengan munculnya berbagai kebijakan pemerintah terkait pendidikan nasional, hal ini disambut dengan antusias dan optimisme oleh masyarakat, khususnya pengelola pendidikan. Berbagai inovasi dan kreativitas dalam mengembangkan elemen-elemen pendidikan telah banyak berkembang di institusi pendidikan. Melalui dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), masyarakat kurang mampu diberi kesempatan untuk menyekolahkan anak-anak mereka. Program sertifikasi bagi Guru dan Dosen juga memotivasi mereka untuk menjalankan tugas dengan lebih baik. Adanya Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) dan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) menciptakan suasana akademik serta proses belajar mengajar yang lebih kreatif, inovatif, dan mandiri. Selain itu, dengan adanya Standar Nasional Pendidikan, kesadaran para pengelola pendidikan untuk melakukan akreditasi program studi semakin meningkat.⁹ (Putriani L. Maliki, 2022)

Era Reformasi menjadi momentum penting untuk perbaikan pendidikan Islam melalui kebijakan yang diperjuangkan baik secara politik maupun kultural.¹⁰ (Risnita, 2022) Kebijakan pendidikan Islam pada masa ini berfokus pada perencanaan dan manajemen pendidikan yang bertujuan meningkatkan pemahaman peserta didik akan potensinya, masyarakat, dan lingkungannya. Pendidikan Islam tidak hanya berorientasi pada pengajaran kognitif atau ritual keagamaan, tetapi juga pada penerapan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari.¹¹ (Kodir, 2018)

Secara keseluruhan, dinamika kebijakan pendidikan agama Islam terus berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan kondisi politik. Pemerintah terus memberikan perhatian besar pada pendidikan agama Islam demi mewujudkan sistem pendidikan yang inklusif dan berkualitas di era Reformasi.¹² (Sutiah, 2018) Kebijakan pendidikan Islam di era Reformasi harus terus berkembang untuk menyeimbangkan kebebasan dan pengawasan, serta untuk mengatasi tantangan kesenjangan dan memanfaatkan peluang inovasi. Hal ini penting untuk memastikan bahwa pendidikan Islam tidak hanya mempertahankan identitas keagamaannya tetapi juga berkontribusi pada pembentukan identitas kebangsaan yang inklusif dan dinamis. Perkembangan pendidikan Islam di era reformasi menunjukkan kemajuan yang signifikan dibandingkan masa sebelumnya. Diharapkan kemajuan ini dapat terus berlanjut agar generasi penerus tidak hanya unggul dalam ilmu pengetahuan, tetapi juga memiliki landasan moral yang kuat sesuai dengan ajaran agama. (Novitasari, 2021)

Tantangan Kebijakan Pendidikan Islam Pada Masa Reformasi

Tantangan utama dalam kebijakan pendidikan Islam di era Reformasi, sebagaimana diungkapkan oleh Nirmala dan Zalnur serta Safei dan Hudaidah, adalah

⁹ Putriani L. Maliki, dkk, 2022, Arah Kebijakan Pendidikan Islam Pasca Reformasi di Indonesia, *Tadbir: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, Vol. 10. No. 1, h. 90-91.

¹⁰ Risnita, dkk, 2022, *Kapita Selekta Manajemen Pendidikan Islam*, Riau: Dotplus Publisher, h. 217.

¹¹ Abdul Kodir, 2018, *Sejarah Pendidikan Islam: Dari masa rasulullah hingga reformasi di Indonesia*, Jawa Barat: CV. Pustaka Setia, h. 225-227.

¹² Sutiah, 2018, *Pengembangan Model Pembelajaran PAI*, Jawa Timur: Nizamia Learning Center, h. 40.

menemukan keseimbangan antara otonomi lokal dan standar nasional. Pemerintah harus memastikan bahwa institusi pendidikan Islam memiliki kebebasan untuk menyesuaikan pengajaran mereka dengan kebutuhan lokal, sambil tetap menjaga kepatuhan terhadap standar kualitas nasional. Hal ini penting untuk mencegah terjadinya fragmentasi dalam sistem pendidikan serta memastikan semua siswa, tanpa memandang lokasi atau institusi tempat mereka belajar, mendapatkan pendidikan yang berkualitas.

Selain itu, tantangan lain yang dihadapi adalah kesenjangan kualitas pendidikan antara daerah maju dan daerah yang kurang berkembang. Ketimpangan ini berpotensi memperburuk ketidakadilan sosial dan memperkuat segregasi sosial-ekonomi. Oleh karena itu, diperlukan upaya serius dari pemerintah dan pemangku kepentingan untuk memastikan distribusi sumber daya yang lebih merata dan memberikan dukungan yang cukup bagi daerah-daerah tertinggal.

Namun, desentralisasi kebijakan pendidikan juga memberikan peluang besar untuk inovasi. Dengan adanya otonomi yang lebih luas, institusi pendidikan Islam dapat mengembangkan kurikulum yang lebih relevan dan kontekstual. Kurikulum ini tidak hanya mencakup aspek-aspek keagamaan, tetapi juga mempersiapkan siswa menghadapi tantangan global. Sebagaimana dicatat oleh Anshori et al, Kosim et al, dan Mahmuda et al, kurikulum tersebut dapat mencakup pengajaran tentang toleransi, pemahaman lintas budaya, serta keterampilan abad ke-21 yang sangat penting untuk sukses di dunia yang semakin kompleks dan saling terhubung. (Aji Wahyudin, 2024)

Dampak Kebijakan Pada Masa Reformasi Terhadap Pendidikan Islam

Secara umum, era reformasi di Indonesia memberikan dampak positif yang signifikan terhadap pendidikan Islam. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pesat mendorong pemerintah untuk lebih fokus mempertahankan eksistensi pendidikan Islam, baik di tingkat nasional maupun internasional. Kebijakan yang diterapkan selama era ini merupakan kelanjutan dari kebijakan sebelumnya yang relevan dengan tuntutan zaman.

Reformasi di Indonesia membawa dampak positif dengan memberikan ruang lebih luas, otonomi yang lebih besar, dan integrasi yang lebih baik bagi pendidikan Islam dalam sistem pendidikan nasional. Beberapa dampak positif tersebut antara lain:

1. Integrasi dengan Sistem Pendidikan Nasional

Madrasah kini diakui setara dengan sekolah umum dan mendapatkan pengakuan resmi atas kontribusinya dalam sistem pendidikan nasional. Pesantren juga diberikan kesempatan untuk menyelenggarakan program pendidikan formal dan nonformal, termasuk pelajaran agama Islam dan umum. Fleksibilitas ini memungkinkan pesantren untuk menyesuaikan kurikulum dengan kebutuhan lokal dan aspirasi masyarakat.

2. Perguruan Tinggi Islam yang Mandiri

Reformasi memberikan kesempatan bagi perguruan tinggi Islam untuk mengembangkan kurikulum dan standar akademiknya secara mandiri. Dengan

demikian, mereka dapat menyesuaikan pendidikan dengan kebutuhan pasar kerja dan aspirasi mahasiswa.

3. Keanekaragaman Kurikulum dan Metode

Pendidikan Islam kini lebih beragam dalam pendekatannya. Beberapa madrasah menekankan pendidikan keagamaan yang mendalam, sementara yang lain lebih fokus pada aspek ilmiah, sosial, dan budaya. Ini membuka ruang bagi siswa untuk memilih pendidikan yang sesuai dengan minat dan bakat mereka.

4. Responsif terhadap Tantangan Zaman

Madrasah dan pesantren kini lebih responsif terhadap isu-isu kontemporer seperti demokrasi, hak asasi manusia, pluralisme, gender, lingkungan, dan globalisasi. Dengan demikian, siswa dibekali kemampuan untuk menghadapi tantangan sosial, politik, dan lingkungan yang semakin kompleks.

Perkembangan sosial dan budaya masyarakat yang pesat, seiring dengan kemajuan teknologi sains, semakin menguatkan pentingnya pendidikan karakter di Indonesia. Dalam hal ini, pendidikan karakter menjadi alternatif dalam pendidikan Islam yang dapat membentuk manusia agar tidak terjajah atau terpinggirkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Munculnya revolusi industri yang dikenal dengan reformasi budaya masyarakat 4.0 di Tiongkok, serta fenomena digitalisasi budaya manusia yang dikenal dengan revolusi budaya masyarakat 5.0 di Jepang, semakin mempertegas urgensi penerapan pendidikan karakter di Indonesia. Inilah tantangan nyata yang dihadapi oleh pendidikan Islam saat ini, seiring dengan visi dan misi ajaran Islam yang diwahyukan sebagai "rahmatan lil'alam," yang juga mencakup "alam virtual."¹³ (Jannah, 2019)

Dalam bidang pendidikan, Kabinet Reformasi melanjutkan program wajib belajar 9 tahun yang dimulai pada 1994 serta memperbaiki sistem pendidikan agar lebih demokratis. Salah satu tugas utama Kabinet Reformasi adalah menjaga partisipasi pendidikan tetap tinggi dan mencegah angka putus sekolah. Namun, akibat krisis berkepanjangan, pemerintah harus memangkas beberapa program, termasuk penyetaraan guru, serta mengalami kemunduran dalam program wajib belajar 9 tahun. Sekolah juga menghadapi tantangan besar karena meningkatnya biaya operasional dan menurunnya jumlah siswa.

Program pembangunan sektor pendidikan tidak mencapai hasil maksimal karena beberapa faktor, seperti distribusi pembangunan yang kurang menyentuh lapisan sosial bawah, fokus pembangunan pada aspek material fisik, serta pengabaian masalah spiritual dan kognitif. Selain itu, perubahan sosial yang tidak teratur dan eksklusif dalam pembangunan juga menjadi tantangan. Hal ini berdampak negatif pada pencapaian tujuan pendidikan, terutama di sektor pendidikan agama Islam.¹⁴ (Kodir, 2018)

Secara keseluruhan, reformasi memberikan kebebasan dan fleksibilitas yang memungkinkan pendidikan Islam berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern. Namun, pendidikan Islam juga menghadapi tantangan, termasuk harus

¹³ Miftahol Jannah, dkk, 2019, Sejarah reformasi pendidikan Islam di Indonesia, *Ta'dibuna: Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 8, No. 1, h. 43-44.

¹⁴ Abdul Kodir, *Loc. Cit.*

bersaing dalam hal kualitas dan relevansi dengan pendidikan umum, serta menjawab isu-isu penting seperti radikalisme, kemiskinan, dan ketimpangan sosial.¹⁵ (Selvia, 2024)

Lembaga Pendidikan Islam Pada Masa Reformasi

Lembaga pendidikan Islam di Indonesia telah mengalami perkembangan pesat sejak era Reformasi hingga saat ini. Berikut adalah beberapa jenis lembaga pendidikan Islam yang berkembang pada masa tersebut:

1. Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) SDIT dan MI merupakan institusi pendidikan dasar yang mengintegrasikan pendidikan agama Islam dengan pendidikan umum. Meski sudah hadir sejak era Orde Baru, lembaga ini tetap menjadi salah satu pilihan utama masyarakat dalam pendidikan Islam hingga sekarang.
2. Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan Madrasah Aliyah (MA) MTs dan MA adalah lembaga pendidikan menengah yang juga memadukan kurikulum pendidikan Islam dan umum. Di bawah naungan Kementerian Agama, kedua lembaga ini terus berkembang dan berperan penting dalam pendidikan Islam di Indonesia.
3. Pondok Pesantren Pesantren adalah lembaga pendidikan Islam tradisional yang fokus pada kajian ilmu-ilmu agama seperti tafsir, hadits, fiqh, dan bahasa Arab. Pesantren telah menjadi bagian integral pendidikan Islam sejak sebelum kemerdekaan dan tetap bertahan hingga kini.
4. Universitas Islam Negeri (UIN) UIN adalah perguruan tinggi yang menawarkan kombinasi pendidikan agama Islam dan pendidikan umum. Didirikan pada masa Orde Baru, UIN kini menjadi salah satu institusi pendidikan Islam terkemuka di Indonesia.

Selain itu, muncul pula lembaga pendidikan Islam modern yang menerapkan konsep inovatif, seperti Sekolah Islam Terpadu (SIT) dan Pesantren Modern Gontor. Hal ini menunjukkan kemampuan lembaga pendidikan Islam di Indonesia untuk terus beradaptasi dengan perkembangan zaman, menawarkan pendidikan yang berkualitas dan relevan dengan kebutuhan masyarakat.¹⁶ (Sirozi, 2023)

PEMBAHASAN

Kebijakan Pendidikan Islam di Era Reformasi melalui perspektif historis dan analitis. Ada beberapa aspek utama yang dijelaskan dalam artikel ini, yaitu transformasi sistem pendidikan, kebijakan strategis, kemajuan dan tantangan, serta peran pendidikan Islam dalam era reformasi.

¹⁵ Noor Liyana Selvia, 2024, Sistem Penyelenggaraan Pendidikan Islam Pada Era Reformasi: Di Sekolah Umum, Madrasah, Pondok Pesantren dan Majelis Taklim, *Al-Madrasah: Jurnal Ilmiah Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah*, Vol. 8, No. 2, h. 796-797.

¹⁶ Ana Kurnia Sari dan Muhammad Sirozi, *Op. Cit*, h. 33.

Transformasi Sistem Pendidikan

Era Reformasi menjadi tonggak perubahan besar dalam dunia pendidikan di Indonesia, terutama pada sistem pendidikan Islam. Transisi dari sistem pemerintahan sentralistik menuju desentralistik membuka ruang bagi pendidikan Islam untuk berkembang lebih otonom dan responsif terhadap kebutuhan lokal.¹⁷ (Aji Wahyudin, 2024)

1. Pengakuan dalam Sistem Nasional: Pendidikan Islam memperoleh legitimasi kuat sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Undang-undang ini tidak hanya mengakui madrasah, tetapi juga pesantren, ma'had 'Ali, Raudhotul Athfal, dan Majelis Ta'lim sebagai lembaga pendidikan formal, nonformal, dan informal yang sejajar dengan pendidikan umum.
2. Modernisasi Institusi: Perguruan tinggi Islam, seperti Institut Agama Islam Negeri (IAIN) yang berubah menjadi Universitas Islam Negeri (UIN), mulai mengintegrasikan ilmu keagamaan dengan ilmu umum. Langkah ini bertujuan menghasilkan lulusan yang tidak hanya memahami agama secara mendalam tetapi juga memiliki keterampilan untuk menghadapi tantangan zaman.

Kebijakan Strategis

Era Reformasi melahirkan berbagai kebijakan strategis yang bertujuan meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pendidikan Islam:

1. Pengalokasian Anggaran: Pemerintah mengalokasikan 20% APBN untuk pendidikan, yang mencakup gaji guru, pengadaan fasilitas, beasiswa bagi siswa kurang mampu, dan pelatihan tenaga pengajar. Langkah ini memberikan dampak positif terhadap peningkatan kualitas pendidikan Islam.
2. Program Wajib Belajar 9 Tahun: Kebijakan ini memastikan bahwa setiap anak Indonesia mendapatkan pendidikan dasar yang mencakup pelajaran agama. Hal ini memberikan dasar yang kuat bagi generasi muda untuk memahami nilai-nilai keagamaan sejak dini.
3. Peningkatan Kompetensi Guru: Melalui program sertifikasi, pemerintah berupaya meningkatkan profesionalisme guru, baik di lembaga negeri maupun swasta. Program ini mendorong guru untuk memiliki kompetensi akademik, pedagogik, kepribadian, dan sosial yang lebih baik.
4. Pengembangan Kurikulum: Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) pada 2004 dan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) pada 2006 dirancang untuk mendorong kreativitas, kemandirian, dan kemampuan analitis siswa.¹⁸ (Debiyandrizal, 2023)

Kemajuan dan Tantangan

1. Kemajuan

- a. Pendidikan Islam kini lebih inklusif, mengakomodasi berbagai kebutuhan lokal dan nasional.

¹⁷Aji Wahyudin, "Kontestasi Kebijakan Pendidikan Islam Di Era Orde Baru Dan Reformasi.," *Journal of Education Management Research (JEMR)*, 2, no. 1 (2024).

¹⁸Debiyandrizal, "Kebijakan Pemerintah Orde Lama, Orde Baru, Dan Era Reformasi," *Journal Of International Multidisciplinary Research* 1, no. 2 (2023).

- b. Lembaga seperti pesantren dan madrasah telah bertransformasi menjadi institusi modern yang memadukan pendidikan agama dan umum.
 - c. Respons terhadap isu-isu global seperti pluralisme, demokrasi, dan lingkungan semakin kuat.
2. Tantangan
- a. Kesenjangan Regional: Perbedaan kualitas pendidikan antara daerah maju dan tertinggal masih menjadi persoalan serius. Ketimpangan ini dapat memperburuk segregasi sosial-ekonomi.
 - b. Radikalisme dan Intoleransi: Masalah ini muncul sebagai tantangan dalam menjaga keseimbangan antara pengajaran agama yang mendalam dan pemahaman yang inklusif.
 - c. Kompetisi Global: Pendidikan Islam harus mampu beradaptasi dengan tuntutan globalisasi tanpa kehilangan identitas keagamaannya.¹⁹ (Nirmala, 2024)

Peran Pendidikan Islam dalam Reformasi

Pendidikan Islam memainkan peran penting dalam membentuk karakter bangsa. Integrasi nilai-nilai agama dalam kurikulum mencerminkan upaya mencetak generasi muda yang tidak hanya cerdas secara intelektual tetapi juga memiliki landasan moral yang kuat. Beberapa kontribusi penting pendidikan Islam di era Reformasi adalah:

- a. Pembentukan Karakter: Pendidikan Islam berperan dalam membangun karakter siswa yang berbasis nilai-nilai agama, keberagaman, dan toleransi.
- b. Kemandirian Institusi: Dengan adanya desentralisasi, lembaga pendidikan Islam memiliki otonomi lebih besar untuk mengembangkan kurikulum dan metode pengajaran yang relevan.
- c. Inovasi dalam Pendidikan: Pesantren dan madrasah mulai mengadopsi pendekatan modern seperti pembelajaran berbasis teknologi dan pengembangan keterampilan abad ke-21.²⁰ (Sirozi, 2023)

KESIMPULAN

Era Reformasi membawa perubahan signifikan pada pendidikan Islam di Indonesia. Kebijakan strategis seperti pengakuan dalam sistem pendidikan nasional, alokasi anggaran, dan pengembangan kurikulum telah memperkuat posisi pendidikan Islam sebagai bagian integral dari sistem pendidikan nasional. Namun, tantangan seperti kesenjangan regional, radikalisme, dan kompetisi global memerlukan perhatian serius.

Pendidikan Islam harus terus berkembang, memanfaatkan peluang desentralisasi untuk inovasi, dan menjawab tantangan zaman. Dengan demikian, pendidikan Islam dapat menjadi pilar utama dalam membentuk generasi penerus yang unggul secara intelektual dan moral, serta mampu berkontribusi dalam masyarakat global yang inklusif.

¹⁹ Z Nirmala, "Analisis Pendidikan Islam Zaman Modern: Studi Kritis Tentang Kebijakan Pemerintahan Orde Lama, Orde Baru, Dan Era Reformasi Terhadap Pendidikan Islam.," *Murabby: Jurnal Pendidikan Islam* 7, no. 1 (2024).

²⁰ A. K. Sirozi, "Politik Pendidikan Islam Masa Reformasi (1998-Sekarang)," *Tarbawy: Jurnal Pendidikan Islam* 10, no. 1 (2023).

REFERENSI

- Aji Wahyudin, d. (2024). Kontestasi Kebijakan Pendidikan Islam di Era Orde Baru dan Reformasi. *Journal of Education Management Research (JEMR)*, Vol. 2, No. 1, 53-54.
- Bahri, S. (2020). *Sejarah Sosial Pendidikan Islam*. Jawa Barat: Adab.
- Debiyandrizar, d. (2023). Kebijakan Pemerintah Orde Lama, Orde Baru, dan Era Reformasi. *Journal Of International Multidisciplinary Research*, Vol. 1, No. 2, 296.
- Hudaidah, T. S. (2021). Sistem dan Kebijakan Pemerintah Terhadap Pendidikan Islam Pada Era Reformasi. *SINDANG: Jurnal Pendidikan Sejarah dan Kajian Sejarah*, Vol. 3, No. 2, 159.
- Izza Lutfiyana, d. (2021). Tinjauan Histori Terhadap Permasalahan Pendidikan Islam Dalam Pendidikan Nasional. *At-Ta'lim : Jurnal Pendidikan*, Vol. 7 No. 2, 121-122.
- Jannah, M. (2019). Sejarah reformasi pendidikan Islam di Indonesia. *Ta'dibuna: Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 8, No. 1, 43-44.
- Kodir, A. (2018). *Sejarah Pendidikan Islam: Dari masa rasulullah hingga reformasi di Indonesia*. Jawa Barat: CV. Pustaka Setia.
- Nata, A. (2022). *Sejarah Pendidikan Islam*. Jakarta: Kencana.
- Nirmala, Z. (2024). Analisis Pendidikan Islam Zaman Modern: Studi Kritis tentang Kebijakan Pemerintahan Orde Lama, Orde Baru, dan Era Reformasi terhadap Pendidikan Islam. *Murabby: Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 7, No. 1, 31.
- Novitasari, F. P. (2021). Transformasi Pendidikan Islam di Indonesia pada Era Reformasi. *Jurnal Arsip Akademik*, Vol. 02, No. 01, 29.
- Putra, H. d. (2022). Pendidikan Islam Orde Reformasi (Pendekatan Politik dan Kebijakan Pendidikan). *Jurnal Ilmu Agama Islam*, Vol. 4, No. 1, 28.
- Putriani L. Maliki, d. (2022). Arah Kebijakan Pendidikan Islam Pasca Reformasi di Indonesia. *Tadbir: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, Vol. 10. No. 1, 90-91.
- Risnita, d. (2022). *Kapita Selekta Manajemen Pendidikan Islam*. Riau: Dotplus Publisher.
- Selvia, N. L. (2024). Noor Liyana Selvia. *Al-Madrasah: Jurnal Ilmiah Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah*, Vol. 8, No. 2, 796-797.
- Sirozi, A. K. (2023). Politik Pendidikan Islam Masa Reformasi (1998-Sekarang). *Tarbawy: Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 10, No. 1, 21-22.
- Sujatmiko, R. F. (2020). PENELITIAN KEPUSTAKAAN (LIBRARY RESEARCH) MODUL PEMBELAJARAN BERBASIS. *Jurnal IT-EDU*, Vol. 05, No. 01, 319.
- Sutiah. (2018). *Pengembangan Model Pembelajaran PAI*. Jawa Timur: Nizamia Learning Center.
- Syaiful, A. (2018). Politik Pendidikan Islam Masa Reformasi. *AL-IMAN: Jurnal Keislaman dan Kemasyarakatan*, Vol. 2, No. 1, 143-148.
- Syarif, Z. H. (2020). *Agama&Perubahan Sosial*. Jakarta: Publica Institute Jakarta.
- Tolchah. (2015). *Dinamika Pendidikan Islam Pasca Orde Baru*. Yogyakarta: Lkis Pelangi Aksara.
- Zidah, A. A. (2021). *Sejarah Perkembangan Pendidikan Islam Era Reformasi di*

Indonesia. *Historia: Jurnal Program Studi Pendidikan Sejarah*, Vol. 9, No. 1, 99-100.